

## SEKOLAH KEJURUAN ATAU SEKOLAH UMUM: KASUS ORANG DAYAK DI KALIMANTAN TIMUR<sup>1</sup>

Oleh L. Dyson P.  
(Prodi Antropologi Fisip Unair Surabaya)

FIKA SPG tuding pemkab tak konsisten. Kediri, Surya, 17-5-2001.  
Forum Informasi Alumni (FIKA) Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Kediri menyesalkan sikap tidak konsisten Pemkab Kediri dalam menyelesaikan tuntutan alumni SPG yang meminta diangkat menjadi pegawai *negeri sipil* (PNS) guru SD. .... Menyusul pembatalan acara klarifikasi ke Surabaya, sejumlah perwakilan FIKA menemui staf Kepala Kantor Kepegawaian. Perwakilan FIKA tetap menuntut hasil kesepakatan bersama ditinjaklanjuti. .... Klarifikasi ke pemerintah propinsi (pemprov) dilakukan sebagai hasil kesepakatan bersama setelah ratusan alumni SPG di Kediri melakukan unjuk rasa ke kantor pemkab. Alumni SPG yang umumnya pernah menjadi guru *wiyata bakti* (*guru magang*) itu menuntut segera diangkat menjadi PNS guru SD. .... “Kami ingin dalam pengangkatan guru SD ada transparansi”. ....FIKA yang saat ini beranggotakan sekitar 160 alumni SPG di Kabupaten Kediri itu tetap menuntut diangkat menjadi PNS guru SD. Alasannya, lulusan SPG memang dipersiapkan menjadi guru SD.

Demikian cuplikan berita di media massa mengenai nasib para lulusan Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (SPG), mereka telah berupaya menempuh pendidikan kejuruan dalam bidangnya, tetapi karena kebijakan pemerintah yang mengatasmakan “peningkatan mutu pendidikan” para calon guru justru tidak dapat menjadi guru. Untuk menjadi guru SD seseorang wajib menempuh pendidikan guru sekolah dasar (PGSD).

Permasalahan yang dialami para lulusan SPG tersebut sungguh menyedihkan, tetapi merupakan peristiwa yang dianggap “biasa” di republik ini. Beberapa tahun yang lalu di sebuah desa di pedalaman Kalimantan Timur, banyak orang tua siswa yang mengeluh, betapa tidak bahwa mereka telah berkorban dan menjual apa saja yang dimiliki untuk membiayai putra dan putri mereka untuk “sekolah”. Tetapi apa yang diperoleh dari pengorbanan itu adalah setelah lulus anak-anak tadi masih menjadi beban keluarga secara lahir batin karena “lulusan SPG” tidak boleh menjadi guru! Lalu mau jadi apa mereka? Kembali meniru tradisi nenek moyang mereka yakni ladang berpindah dan menambah jumlah angkatan kerja yang menganggur. Bukankah ladang berpindah dituduh merusak lingkungan?

---

<sup>1</sup> Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke 2 di Padang tanggal 18-21 Juli 2001

Dengan adanya penolakan lulusan SPG diangkat menjadi guru, orang-orang atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah bersikap “buat apa sekolah”? toh setelah lulus tidak ada gunanya. Sekolah hanya menghabiskan biaya dan menyebabkan mereka semakin miskin. Anak-anak yang sudah lulus sebagian besar tidak mau lagi bekerja di ladang, maunya hanya pergi ke kota dan jalan-jalan keliling kampung dengan teman sebaya mereka.

Ganti menteri ganti kurikulum! Demikian keluhan orang tua siswa, ganti kurikulum berarti ganti buku ajar, hal ini berarti beban ekonomi orang tua karena harus membeli buku-buku baru dengan kurikulum baru yang sudah disesuaikan. Guru-guru ikut bingung, sudah ditatar dengan aneka macam pengetahuan baru, toh cara dan pengetahuan mengajarnya ya begitu-begitu saja! Banyak diberitakan di media massa “guru menjadi tukang ojek”, orang lupa atau tidak tahun bahwa guru-guru dahulu memperoleh prioritas kredit pembelian sepeda motor (KPG, yang dewasa ini sudah dihapus!), sehingga bila kita jalan-jalan ke desa ada orang mengendarai sepeda motor sudah dapat diduga bahwa mereka pasti guru. Salahkan bila guru menjadi tukang ojek? Dalam situasi desa yang terpencil menjadi tukang ojek adalah cara beramal karena telah membantu sesama warga sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan yang halal dan turut meringankan beban membayar cicilan utang sepeda motornya.

Pengalaman pendidikan para orang tua-tua di daerah terpencil pulau Kalimantan pada masa penjajahan Belanda patut disimak, misalnya para pemuda dikumpulkan di bawah pohon rindang dan duduk di atas kursi buatan sendiri termasuk juga meja yang dibuat dari batang pohon. Sebelum pelajaran dimulai para siswa disuruh minum susu dan sarapan pagi. Mereka juga dilatih mengenakan baju dan celana, lalu dilengkapi dengan pelajaran bagaimana membuat sabun cuci, juga dilatih untuk trampil mencukur rambut. Pelajaran utama adalah membaca, menulis dan berhitung. Setelah itu diajarkan bercocok tanam baik tanaman pangan maupun tanaman yang bernilai ekspor seperti karet, kelapa, kopi, cengkeh dan pala. Selain bercocok tanam pengetahuan pertukangan terutama tukang kayu juga diberikan. Sehingga tidak lah mengherankan lulusan sekolah “bawah pohon” memiliki pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal ketika terjun dalam masyarakat.

Nampaknya ide sekolah kerja sebagaimana yang diterapkan di masa penjajahan Belanda itu adalah model pendidikan yang pernah dikembangkan di Philadelphia pada abad 17. Pada masa yang lampau anak memperoleh ketrampilan kerja karena *magang* pada orang tua mereka. Sebagai

ilustrasi yakni anak petani akan menjadi petani, anak pandai besi akan menjadi pandai besi, dan anak tukang roti akan menjadi tukang roti. Model-model seperti itu kemudian dikembangkan oleh para ahli dunia kependidikan di masa itu, seperti adanya konsep “sekolah kecil”.

Munculnya revolusi industri pada abad ke 18 menyebabkan pengetahuan keterampilan bercocok tanam (dalam bidang pertanian) beralih ke pengetahuan dan ketrampilan dalam dunia yang sama sekali baru yakni industri. Sejak itu muncul model sekolah klasikal. Anak didik setelah lulus diharapkan mampu terserap dalam dunia industri artinya mereka siap jadi pekerja. Dalam model klasikal ada yang mencampurkan tujuan pendidikan yakni umum dan kejuruan, tetapi ada pula yang memisahkan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan. Misalnya ada sekolah teknik, sekolah guru, sekolah umum. Sekolah teknik (ST) kemudian dihapus karena dinilai membutuhkan dana besar untuk mengelola sekolah-sekolah kejuruan, terutama untuk praktikum.

Khususnya sekolah guru, nampaknya dahulu dikenal macam-macam sekolah guru. Untuk guru SD didirikan sekolah guru B (SGB), yang kemudian ditingkatkan menjadi sekolah guru A (SGA). Upaya menambah kemampuan guru dalam menjalankan tugas mereka diselenggarakan kursus pendidikan guru (KPG). Ada pula pendidikan guru sekolah lanjutan tingkat pertama (PGSLTP). Dalam perkembangan kemudian khusus untuk guru SD didirikan SPG sebagai pengganti SGA yang sudah ditutup. Kekurangan tenaga guru SD menimbulkan ide mendirikan SPG C II yakni program pendidikan guru SD secara khusus selama satu tahun dengan mendidik para lulusan SLTP. Tetapi karena di daerah terpencil para lulusan SLTP dapat dihitung dengan jari, akhirnya lulusan SD pun diperkenankan mengikuti program SPG C II tersebut. Jadi lulus SD, mengikuti pendidikan selama satu tahun dan bila lulus (jarang tidak lulus) akan mengajar SD! SPG ditutup kemudian diganti dengan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), peserta PGSD adalah lulusan sekolah menengah umum (SMU). Belum tuntas pelaksanaan program PGSD, karena tuntutan kekurangan guru SD, beberapa daerah tingkat II (kabupaten) mulai melirik para lulusan SPG yang sudah ditinggalkan itu untuk diangkat menjadi guru baik sebagai pegawai negeri sipil maupun bersatus guru kontrak. Di kabupaten Kutai Barat misalnya lulusan SPG akhirnya mendapat angin, yang semula sudah mengalami depresi dan stress berat merenung nasib mereka bisa tersenyum simpul karena dapat menjadi guru sesuai dengan bidang pendidikan yang ditekuni mereka. Itulah cerminan pendidikan guru SD kita. Belum lagi bila kita

mendiskusikan betapa menyedihkannya imbalan yang diperoleh para guru sebagai hasil jerih payah mereka, aneka macam potongan yang mau tidak mau harus disetujui, dan belum tentu gajinya dapat diambil secara rutin setiap bulannya (di daerah tertentu guru menerima gaji tiga atau enam bulan sekali).

Sekolah umum atau sekolah kejuruan? Dalam tataran konsep semuanya sudah ada dan baik, misalnya ada konsep *link and match* yang meniru negara industri maju seperti di Jerman misalnya. Ada kerja sama antara tuntutan dunia industri dengan dunia pendidikan yang menyiapkan tenaga trampil dan ahli dalam bidangnya. Guru, orang tua dan para pengusaha diajak bekerja sama memajukan dunia pendidikan (majelis/dewan sekolah).

Ada pula konsep bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memperhatikan hal-hal berikut: relevansi, kualitas, pemerataan dan efisiensi. Program yang telah dilaksanakan misalnya didirikan sekolah-sekolah kejuruan, tetapi kemudian banyak sekolah kejuruan itu ditutup dengan berbagai alasan seperti kekurangan dana, kekurangan peminat atau sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Ada program SD kecil, sekolah terbuka, sekolah jarak jauh. Sekolah yang lebih bernuasa agama ada yang disesuaikan baik dalam cara penyampaian materi dan interaksi guru murid maupun mengenai muatan kurikulumnya.

Sekolah menjadikan seseorang trampil bekerja atau membuat orang menjadi bijak? Sekolah-sekolah kejuruan dan kursus-kursus menjanjikan kemahiran dan ketrampilan sebagaimana abad-abad yang lampau. Tetapi dalam dunia yang terus berubah dengan cepat sementara orang menilai bahwa sekolah yang berorientasi pada ketrampilan hanya menciptakan tukang-tukang baru dalam mengisi pasar tenaga kerja. Mereka akan menjadi kelas pekerja (buruh), dan selama hidup mereka akan tetap menjadi kelas pekerja/tukang. Perubahan sosial secara vertikal jarang terjadi, orang kaya semakin kaya dan kelas pekerja tetap menjadi kelas pekerja sampai ke anak cucu mereka. Kalau demikian realitanya, maka sekolah umum dapat dijadikan alat perubahan sosial secara vertikal! Bila filosofinya sekolah mengajarkan orang menjadi bijak, sekolah kejuruan atau sekolah umum sama bermanfaatnya. Seseorang bisa menjadi apa saja dalam masyarakat, asalkan dia mampu menempatkan dan menyesuaikan dirinya dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Kesenjangan antara perdebatan teori dan permasalahan nyata yang terjadi dalam masyarakat hendaknya menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun rencana

pendidikan. Fungsi kontrol dalam pelaksanaan program nampaknya akan menjadi penting demi terlaksananya sistem pendidikan yang baik. Para ahli pendidikan yang kebanyakan tinggal di kota-kota besar dengan orientasi ke negara-negara maju, terkadang terlalu jauh memandang dan lupa situasi dan kondisi dalam masyarakat. Sulit dibayangkan misalnya orang-orang tua calon siswa baru, demo/protes terhadap kepala sekolah karena sistem penerimaan siswa baru yang dinilai tidak transparan padahal sesungguhnya aturannya sudah ada dan jelas aturan mainnya. Lalu permasalahannya di mana? Jawaban klasiknya sudah ditemukan: gaji yang kecil dan mental yang bobrok!

Mungkin pertanyaan yang perlu didiskusikan adalah “Mana yang lebih mendesak diperbaiki, sistem pendidikan nya atau masyarakat nya? Atau dalam bahasa yang lain akankah pendidikan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat atau justru masyarakatlah sebagai sumber kekacauan sistem pendidikan?”